



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Piagam Penghargaan

Nomor : 423.3/2833/05/2001.

Diberikan kepada :

Nama : DRS BURHAN EKO PURWANTO.
Alamat : JLN PANCASILA NOMOR 2 TEGAL.
Jabatan : LKTOR KEPALA PADA UNIVERSITAS PANCA
SAKTI TEGAL.

Atas segala dharma bhakti dan karyanya yang disumbangkan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal pada khususnya dan kepada Negara pada umumnya.

Penghargaan ini terutama ditujukan atas jasa dan karyanya yang berupa :

KEIKUTSERTAAN SEBAGAI PEMAKLAAH PADA SEMINAR BAHASA
INDONESIA DAN BAHASA JAWA YANG DI SELENGGARAKAN PADA
TANGGAL 8 NOVEMBER 2001 DI SLAWI DALAM RANGKA PERI-
NGATAN HARI SUMPAH PEMUDA TAHUN 2001.



Slawi, 8 NOVEMBER 2001.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal



Drs. DAENURI HENEVA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 085 561

MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN

Oleh
Burhan Eko Purwanto
Dosen Univeritas Pancasakti Tegal

‘kerapatan laloe mengambil poatoesan’

‘PERTAMA.

‘Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah-darah jang satoe, tanah Indonesia’

‘KEDOE.

‘Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia’

‘KETIGA.

‘Kami poetera dan poeteri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia’

(Soempah Pemoeda, 28 Oktober 1928)

Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan 77 tahun yang lalu, dapat dipersoalkan hingga ke mana kini putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan itu? Bagaimana sikap putra-putri Indonesia sendiri terhadap bahasa Indonesia? Seakan-akan ada semacam kesan bahwa yang berbahasa Indonesia itu kurang pintar, kurang berhasil, kurang berkedudukan; ya, kurang segalanya, jika dibandingkan dengan yang berbahasa asing.

Minat belajar bahasa Indonesia dirasa masih sangat kurang, Kecuali orang asing, tampaknya tak seberapa besar jumlah orang yang berhasrat memperbaiki bahasa Indonesia yang dikuasainya. Dan sayang sekali, justru di kalangan para cendekiawan, sudah menjadi mode untuk memperagakan kata-kata serta istilah-istilah asing dalam tuturan atau pun tulisannya. Syukurlah kalau penggunaannya baik dan tepat. Ada orang yang sangat gemar menggunakan kata-kata semacam *interpretasi* (pakai “s”) dan *frustasi* (tanpa “r”). Mungkin disangka ada hubungannya; atau *interpretasi* dikaitkan dengan *prestasi*, dan *frustasi* barangkali ada sangkut-pautnya dengan *ekstasi*?

Mudah-mudahan orang tidak *frustrasi* (pakai “r”) membaca *interpretasi* (tanpa “s”) yang disajikan ini. Itu hanya dua contoh. Saya tidak bermaksud menganjurkan agar kita semua kuliah bahasa Latin dahulu, bila ternyata banyak istilah intelek dalam bahasa persatuan kita berasal dari bahasa itu atau bahasa Sanskerta atau bahasa Arab. Saya hanya ingin menghimbau bila kita tak sempat lagi menjunjung bahasa kita sendiri, sedikit-dikitnya janganlah kita memperkosa bahasa orang lain.

Andaikata Anda memperhatikan isi iklan yang terdapat di dalam surat kabar mengenai lowongan kerja, maka ternyata syarat yang kebanyakan diutamakan ialah mahir berbahasa

Inggris baik lisan maupun tulisan. Jarang ada iklan yang berisi persyaratan kerja “mahir berbahasa Indonesia” tertulis maupun lisan. Padahal surat-menyurat di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia.

Para usahawan kita masih lebih menitikberatkan hubungan luar negeri daripada dalam negeri. Mungkin merupakan suatu kebanggaan bila karyawan atau sekretarisnya lancar berbahasa asing dan meninggikan prestise di antara sesama rekan. Mencampurbaurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari atau dalam surat-menyurat masih dianggap suatu lambang “kemajuan” dan kemodernan.

Apakah hal-hal tersebut di atas ini merupakan semacam indikator bahwa 77 tahun setelah Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia masih kurang dijunjung oleh putra-putri Indonesia? Apakah mereka masih harus meminjam dari bahasa asing untuk menambah status serta memupuk kepercayaan diri?

Kesadaran menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yang dicetuskan Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan kesadaran nasional yang mendalam. Kesadaran itu bukan saja dilandasi penjajahan, tetapi untuk menciptakan ciri manusia Indonesia yang berpribadi. Tekad itu tampak dalam pelbagai rapat yang diadakan oleh para pemimpin pergerakan Indonesia, yang berusaha keras menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahkan dalam sebuah pertemuan, konon Sutan Syahrir pernah menegur Bung Karno karena menggunakan bahasa Belanda dalam sebuah pertemuan. Saat itu, bahasa merupakan alat perjuangan dan sekaligus mencari kepribadian bangsa yang mempunyai harga diri.

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Yakin! Takkan ada yang membantahnya. Hal itu, bagi kita merupakan suatu karunia Tuhan, karena adanya bahasa itu sekaligus telah melenyapkan persoalan bahasa nasional, yang sangat pelik dan mudah menimbulkan emosi kedaerahan. Sesungguhnya kita sangat beruntung jika dibanding dengan negara-negara yang telah merdeka secara politik bertahun-tahun, tetapi belum juga bebas dari persoalan bahasa nasionalnya. misalnya Filipina, India, dan Kenya.

Di Filipina, bahasa Tagalog hanya secara resminya saja telah dipilih sebagai bahasa nasional, tetapi ketentuan itu sebenarnya masih diterima dengan acuh tak acuh oleh orang-orang Filipina yang tidak berbahasa Tagalog sebagai bahasa pertamanya. Mereka merasakan “ketidakadilan”, bahwa mereka harus mempelajari bahasa nasional itu – di samping bahasa mereka sendiri – , sedangkan orang-orang Tagalog tidak perlu bersusah-payah lagi. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak berbahasa Tagalog lebih suka jika bahasa Inggris saja yang dipakai sebagai bahasa resmi.

Di India keadaan mengenai bahasa Nasional ini jauh lebih parah lagi. Pada permulaan kemerdekaan bangsa India, bahasa Inggris menempati kedudukan bahasa resmi, yang menurut rencana sampai tahun 1960 akan diganti kedudukannya oleh bahasa Hindi (bahasa Arya) sebagai bahasa “persatuan”. Walaupun demikian, kedudukan bahasa Hindi menimbulkan cemburu di antara pembicara-pembicara bahasa lain. Pada tahun 1960 terjadi huru-hara di Assam, karena persoalan bahasa. Selama dua bulan jalan-jalan penuh dengan orang-orang Assam yang menuntut supaya bahasanya dijadikan bahasa negara. Pada tahun 1962 terjadi pula kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh kaum Sikh, yang mengadakan pemogokan lapar, untuk menarik perhatian pemerintah Delhi kepada tuntutan mereka untuk mengakui bahasa Punjab sebagai bahasa resmi, dan mengesampingkan bahasa Hindi.

Lebih menyedihkan lagi ialah persoalan bahasa nasional di negara-negara Afrika yang baru merdeka. Persoalan bahasa ini demikian peliknya, sehingga di Kenya, misalnya, orang Nandis dan Kipsigis yang berbicara dialek-dialek yang saling dipahami tidak mau membaca buku-buku atau literatur yang ditulis dalam salah satu dialek yang lain. Suku Baganda dari Uganda demikian “cintanya” kepada bahasanya, sehingga tidak mau sama sekali melihat bangsa suku lain lebih dipentingkan daripada bahasanya, yaitu bahasa Luganda, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan bahasa Inggris. Masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan betapa pekanya orang-orang menghadapi persoalan bahasa itu.

Di Indonesia, para pelopor pergerakan nasional kita sangat arif sewaktu menyepakati bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal itu dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita, dan bahwa di dalam masyarakat kita tidak terjadi “persaingan bahasa”, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Peran faktor politis dan faktor psikologislah pada kenyataannya yang mendasari tidak terjadinya “persaingan bahasa” pada waktu itu.

Dari faktor politis dapat dijelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia yang dicita-citakan pada waktu itu hanya akan terwujud segera apabila seluruh bangsa Indonesia – yang terdiri atas sekian banyak suku bangsa itu – bersatu. Selain daripada kesatuan dalam cita-cita dan semangat perjuangan, diperlukan suatu alat pemersatu dalam menyatakan perasaan, pikiran, dan kehendak, dan alat itu adalah bahasa. Bangsa Indonesia perlu memiliki satu bahasa kebangsaan, bahasa milik seluruh bangsa tanpa kecuali.

Apa sebab justru bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa misalnya, yang jumlah pemakainya meliputi hampir separuh penduduk Indonesia, juga

bahasa yang kesusasteraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu? Atau, mengapa bukan bahasa Sunda yang dipakai kurang lebih dua puluh juta orang, bahasa yang kesusasteraannya juga sudah maju? Slametmuljana (1965) mengemukakan empat faktor yang menjadi penyebab, salah satu di antaranya adalah faktor psikologis. Yaitu bahwa suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata karena didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya segera ditetapkan bahasa nasional untuk seluruh kepulauan Indonesia. Ada keikhlasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan.

Dalam hubungan inilah kita menyadari jasa pemuda Muhammad Yamin dengan kawan-kawannya yang pada Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928, dan juga sebelumnya, telah memberikan kepada bangsa Indonesia suatu formulasi tentang penyelesaian alat komunikasi bagi kehidupan bangsa yang merdeka dan bersatu.

Itu semua dikemukakan di sini, dalam rangka menyambut peringatan hari “Sumpah Pemuda”, tidak dengan maksud menuding salah satu golongan atau kelompok, tetapi dilandasi itikad untuk mengajak berefleksi terhadap perkembangan keadaan yang kita hadapi sekarang. Refleksi ini agar mendorong kita untuk mengusahakan perbaikan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh pemuda-pemuda kita yang mencetuskan “Sumpah” 77 tahun yang lalu. Dan seperti mereka dulu bertindak dengan semangat kebersamaan, kita pun sekarang dalam mengusahakan perbaikan perlu menggunakan semangat itu.